

INTERNATIONAL MIGRATION AND IMMIGRATION INSPECTION IN POST-PANDEMIC INDONESIA: RESTRICTIVE, PROACTIVE, AND SELECTIVE MIGRATION POLICIES

*MIGRASI INTERNASIONAL DAN PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN
DI INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19: KEBIJAKAN MIGRASI
RESTRIKTIF, PROAKTIF, DAN SELEKTIF*

<https://10.0.205.137/jikk.v7i2.503>

Submitted: 05-10-2024 Reviewed: 13-10-2024 Published: 20-11-2024

Arikson
arikson1998@g
mail.com
**Universitas
Indonesia**

**Fithaloka
Hartinawati
Sholehah**
fithaloka94@g
mail.com
**Universitas
Indonesia**

**Rino Rahaditya
Syahputra**
rinorahaditya1998
@gmail.com
**Universitas
Indonesia**

**Pekik Aulia
Rochman**
junaidmie@g
mail.com
**Universitas
Indonesia**

Rendy Ilyandi
rendy_ilyandi@y
ahoo.com
**Universitas
Indonesia**

Abstract (In English). *This study aimed to analyze the impact of post-COVID-19 pandemic migration policies in Indonesia, focusing on restrictive, proactive, and selective policies. This study used a qualitative analysis approach. This study aimed to provide a holistic and in-depth understanding of the impact of migration policies on international population movements, migrants' contributions to economic recovery, and the dynamics of migrant selection and their integration in various sectors and regions in Indonesia. The results of this study on the COVID-19 pandemic had changed the perspective of international migration. This study investigated the impact of policies on post-pandemic economic recovery. This study used case studies, it was found that restrictive policies were successful in suppressing the spread of COVID-19, but also hampered the economic growth of sectors that depend on human mobility. On the other hand, proactive and selective policies were successful in attracting foreign investment and skilled labor, but also posed challenges in terms of social integration. This study concluded that Indonesia's post-pandemic migration policy is an effort to balance public health, national security, and economic growth which is expected to provide critical insights to policymakers to formulate migration policies that are in accordance with actual conditions and community needs. This study would also help in understanding the contribution of migrants to economic recovery, considering the social and economic impacts of proactive policies implemented. This study also provided a basis for the protection of migrant workers' rights and a sustainable national economic recovery strategy. This study considered the changing views of society towards migration, allowing the identification of factors influencing perceptions and improving the understanding of social integration amidst new migration policies post-Covid-19.*

Keywords: *International migration, migration policy, Covid-19 pandemic, economic recovery contribution, migration policy adaptation*



Abstract (In Bahasa). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan migrasi pasca-pandemi Covid-19 di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan restriktif, proaktif, dan selektif. Melalui pendekatan analisis kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman holistik dan mendalam tentang dampak kebijakan migrasi terhadap pergerakan penduduk internasional, kontribusi migran terhadap pemulihan ekonomi, serta dinamika seleksi migran dan integrasi mereka di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia. Hasil penelitian ini pada Pandemi COVID-19 telah mengubah cara pandang migrasi internasional. Penelitian ini menyelidiki dampak dari kebijakan-kebijakan terhadap pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Melalui studi kasus, ditemukan bahwa kebijakan restriktif memang berhasil menekan penyebaran COVID-19, namun juga menghambat pertumbuhan ekonomi sektor-sektor yang bergantung pada mobilitas manusia. Di sisi lain, kebijakan proaktif dan selektif berhasil menarik investasi asing dan tenaga kerja terampil, namun juga menimbulkan tantangan dalam hal integrasi sosial. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan migrasi Indonesia pasca-pandemi adalah upaya menyeimbangkan antara kesehatan masyarakat, keamanan nasional, dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat memberikan wawasan kritis kepada pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan migrasi yang sesuai dengan kondisi aktual dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga akan membantu dalam memahami kontribusi migran terhadap pemulihan ekonomi, memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan proaktif yang diimplementasikan. Studi ini juga memberikan landasan untuk perlindungan hak pekerja migran dan strategi pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Penelitian ini mempertimbangkan perubahan pandangan masyarakat terhadap migrasi, memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi dan meningkatkan pemahaman tentang integrasi sosial di tengah kebijakan migrasi yang baru pasca Covid-19.

Keywords: Migrasi internasional, kebijakan migrasi, pandemi Covid-19, kontribusi pemulihan ekonomi, adaptasi kebijakan migrasi

1. INTRODUCTIONS

Pandemi Covid-19 telah menciptakan lanskap global yang berubah secara drastis sejak muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok, pada akhir tahun 2019. Virus SARS-CoV-2 menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, memanfaatkan mobilitas global dan konektivitas yang semakin meningkat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan cepat menyatakan pandemi pada Maret 2020 ketika virus telah menyebar ke berbagai negara. Dampak kesehatan pandemi ini terasa secara global, menempatkan tekanan besar pada sistem kesehatan di berbagai negara, menyebabkan lonjakan kasus dan kematian yang signifikan. Migrasi internasional telah menjadi fenomena yang signifikan dalam perkembangan global, memainkan peran penting dalam membentuk dinamika ekonomi, sosial, dan budaya di berbagai negara. Namun, pandemi Covid-19 telah membawa dampak mendalam pada sistem migrasi global, memicu transformasi signifikan dalam kebijakan migrasi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia (Castles, 2014). Keberlanjutan aktivitas migrasi dan upaya pemeriksaan keimigrasian di Indonesia pasca pandemi menjadi kajian yang mendalam, terutama dalam konteks kebijakan migrasi yang makin berkembang menjadi restriktif, proaktif, dan selektif.

Respon terhadap pandemi mencakup berbagai strategi di tingkat nasional dan internasional, termasuk lockdown, pembatasan perjalanan, dan upaya massal untuk pengembangan dan distribusi vaksin Covid-19. Dampak ekonomi yang

meruncing, terutama disebabkan oleh lockdown dan pembatasan, menyebabkan resesi global yang mempengaruhi sektor-sektor ekonomi dari industri hingga pariwisata. Di tingkat nasional, Indonesia juga mengalami transformasi yang signifikan. Penyebaran virus melibatkan seluruh nusantara, memerlukan respons yang beragam tergantung pada karakteristik geografis dan demografis setiap wilayah. Sistem kesehatan Indonesia, seperti di banyak negara lain, dihadapkan pada ujian besar dengan lonjakan kasus dan kebutuhan akan fasilitas perawatan intensif.

Tren migrasi global saat ini menggambarkan dinamika pergerakan manusia yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Sebagai tanggapan terhadap pandemi Covid-19, banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengalami perubahan signifikan dalam kebijakan migrasi mereka, yang tercermin dalam pemeriksaan keimigrasian yang lebih ketat dan responsif. Tren migrasi global saat ini menghadapi tantangan serius seiring dengan adanya pembatasan perjalanan internasional, protokol kesehatan yang diperketat, dan perubahan pola migrasi. Dalam konteks pemeriksaan keimigrasian, banyak negara menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan antara menjaga keamanan nasional dan melindungi hak asasi manusia. Di satu sisi, pemeriksaan keimigrasian yang lebih ketat sering diimplementasikan sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman keamanan, termasuk perdagangan manusia, terorisme, dan kejahatan lintas batas. Pemeriksaan yang lebih ketat ini mencakup peningkatan teknologi pemantauan, penggunaan data biometrik, dan kolaborasi antarnegara untuk pertukaran informasi keimigrasian (Martin & Widgren, 2019).

Pemeriksaan keimigrasian yang berlebihan atau diskriminatif dapat menjadi penghambat bagi individu yang berhak mencari perlindungan atau peluang ekonomi di negara tujuan. Proses pemeriksaan yang lambat atau tidak jelas dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para migran, memberikan dampak negatif pada kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, pemeriksaan keimigrasian saat ini juga mencerminkan perjuangan global untuk mencapai keseimbangan yang adil antara kontrol keimigrasian dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, tren pemeriksaan keimigrasian saat ini juga mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan baru yang muncul, seperti perubahan pola migrasi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Pembatasan perjalanan dan protokol kesehatan yang diterapkan di berbagai negara memiliki dampak langsung pada proses pemeriksaan keimigrasian. Negara-negara cenderung mengadaptasi dan memperkuat protokol kesehatan dalam pemeriksaan keimigrasian untuk mengidentifikasi dan mengisolasi potensi penyebaran penyakit. Dengan demikian, tren migrasi global saat ini, terutama dalam konteks pemeriksaan keimigrasian, mencerminkan dinamika yang kompleks antara keamanan dan hak asasi manusia. Peningkatan teknologi, kerja sama internasional, dan adaptasi terhadap perubahan global adalah beberapa aspek kunci yang memengaruhi bagaimana negara-negara merumuskan kebijakan migrasi dan menerapkan pemeriksaan keimigrasian pasca pandemi Covid-19.

Pemerintah Indonesia merespons dengan menerapkan kebijakan pembatasan dan lockdown, memprioritaskan kesehatan masyarakat. Namun, dampak sosial dan ekonomi pandemi juga menjadi nyata, menciptakan tantangan bagi

masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi akibat penutupan bisnis dan hilangnya pekerjaan. Dalam konteks pertanyaan terkait migrasi, pandemi telah mendorong perubahan dalam kebijakan migrasi di Indonesia. Pemerintah mungkin telah mengambil pendekatan yang restriktif untuk mengontrol masuknya pendatang, sekaligus mengadopsi strategi proaktif untuk memfasilitasi kepulangan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kebijakan migrasi yang selektif juga mungkin telah diimplementasikan untuk memilih migran yang memenuhi kebutuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi tantangan kesehatan global tetapi juga menciptakan dinamika kompleks dalam kebijakan nasional, termasuk kebijakan migrasi, yang akan terus memengaruhi masyarakat dan perekonomian di masa depan (Hatton & Williamson, 2005).

Pandemi Covid-19 tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan global tetapi juga mengubah secara mendasar dinamika mobilitas dan migrasi internasional. Sejak wabah pertama kali dilaporkan di Wuhan, Tiongkok, pada akhir tahun 2019, banyak negara di seluruh dunia menghadapi tekanan besar untuk mengendalikan penyebaran virus. Sebagai respons, pemberlakuan pembatasan perjalanan dan lockdown diterapkan secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perbatasan ditutup, penerbangan internasional dibatalkan, dan visa diberhentikan, menciptakan hambatan signifikan bagi pergerakan manusia.

Dalam konteks migrasi internasional, pandemi ini telah menghentikan atau membatasi program-program migrasi kerja di berbagai negara. Sektor-sektor ekonomi, seperti pariwisata, perhotelan, dan penerbangan, yang biasanya melibatkan pekerja migran, mengalami penurunan aktivitas yang signifikan. Ini mengakibatkan peningkatan tingkat pengangguran dan ketidakpastian pekerjaan, khususnya di kalangan migran yang seringkali bekerja dalam pekerjaan yang rentan terhadap perubahan ekonomi. Kondisi buruh migran menjadi semakin rentan di tengah pandemi ini. Mereka mungkin menghadapi risiko tinggi terkait kehilangan pekerjaan, kurangnya akses ke layanan kesehatan, dan kondisi kerja yang tidak aman. Di samping itu, dampak ekonomi global yang meruncing telah mempengaruhi kemampuan migran untuk mengirimkan remitansi, yang secara tradisional merupakan sumber penting pendapatan bagi keluarga mereka di negara asal.

Keamanan dan pertimbangan kesehatan menjadi faktor utama dalam merancang kebijakan migrasi baru. Pemeriksaan kesehatan, persyaratan karantina, dan protokol keamanan lainnya menjadi bagian integral dari prosedur migrasi internasional. Beberapa negara juga meluncurkan program pemulangan atau repatriasi bagi warganegara mereka yang terdampak atau kehilangan pekerjaan di luar negeri, mencerminkan respons pemerintah terhadap kondisi ekonomi yang sulit di tempat tujuan migran.

Proses imigrasi, termasuk pemberian visa dan status imigrasi, mungkin mengalami penundaan atau pemutusan, mempengaruhi rencana perpindahan orang dari satu negara ke negara lain. Secara keseluruhan, pandemi Covid-19 telah menciptakan tantangan yang beragam bagi populasi migran dan mengubah paradigma mobilitas internasional. Keberlanjutan dampak ini akan terus dipengaruhi oleh perkembangan pandemi, kebijakan pemerintah, dan evolusi kondisi ekonomi global (Borjas, 2014). Dalam hal ini, tantangan dan perubahan

dalam dunia migrasi membutuhkan pendekatan yang holistik dan kolaboratif untuk menjawab dinamika yang terus berkembang ini. Penelitian ini akan fokus pada analisis kebijakan migrasi di Indonesia pasca pandemi Covid-19 dengan menelusuri kebijakan restriktif, proaktif, dan selektif yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam melakukan analisis tersebut, penelitian ini akan memperhatikan dampak kebijakan tersebut terhadap perubahan pola migrasi, ekonomi masyarakat lokal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan migrasi yang diambil.

Beberapa penelitian telah mengkaji dampak pandemi Covid-19 terhadap kebijakan migrasi dan pergerakan penduduk internasional, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi dan tata kelola keimigrasian di Indonesia. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Bayu Aji Wijaya, Fadhil Almarojati dan Jannes Petrus Laoli (2023) berjudul *Upaya Imigrasi dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan yang melemahkan akses bagi wisatawan asing masuk dan keluar dari Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk memahami dampak upaya imigrasi terhadap pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di Indonesia melalui sektor imigrasi. Pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia melalui imigrasi dianggap sebagai suatu hal strategis, terlihat dari peningkatan jumlah penumpang di Bandara Ngurah Rai, Bali, yang mencapai lebih dari 6.000 dan terus meningkat seiring waktu. Peningkatan ini sebenarnya dipengaruhi oleh kebijakan pelonggaran yang diberikan oleh negara kepada wisatawan asing dengan tujuan agar mereka berkunjung ke Indonesia dan dapat memberikan nilai tambah bagi warga Indonesia serta negara melalui serangkaian prosedur, fasilitas, dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan dan difungsikan oleh para wisatawan asing.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Kadek Sintya Anjani, Harits Rafi Putra Pradana dan Yoga Tri Hartanto (2021) berjudul *Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Tata Kelola Keimigrasian di Indonesia*. Penelitian ini mengeksplorasi dampak pandemi Covid-19 terhadap kebijakan migrasi dan masalah overstay dalam konteks tata kelola keimigrasian di Indonesia. COVID-19, sebagai fenomena global, telah mengubah dinamika pergerakan populasi secara signifikan. Populasi lokal dan internasional, termasuk migran yang pindah karena alasan pekerjaan, pendidikan, keluarga, pariwisata, dan kelangsungan hidup, memiliki peran krusial dalam penyebaran wabah. Kehadiran dan pergerakan migran menjadi aspek penting dalam konteks demografi, sosial, budaya, dan ekonomi lokal yang mempengaruhi respons dan pemulihan terhadap pandemi. Penelitian ini mencatat bahwa kebijakan imigrasi di perbatasan Indonesia mengalami tantangan dalam menyikapi situasi pasca-krisis Covid-19. Meskipun instrumen kebijakan diperbarui setiap bulan, adaptasi kebijakan untuk menghadapi situasi pasca-pandemi belum sepenuhnya terwujud. Penelitian ini mencoba untuk mengusulkan konsep *integrated border management (IBM)*, tahapan perumusan kebijakan, dan adopsi teknologi sebagai langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghadapi dinamika migrasi pasca Covid-19.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nasar Meer dan Leslie Villegas (2020) dengan judul *The Impact Of Covid-19 On Global Migration*. Penelitian ini menggambarkan dampak pandemi COVID-19 terhadap migrasi global, terutama dalam konteks penutupan perbatasan dan pembatasan perjalanan yang

diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Fokus utama penelitian ini adalah dampaknya terhadap hak suaka dan penerimaan pengungsi, dengan menyoroti kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh beberapa negara di Amerika Utara dan Eropa. Penelitian mencatat bahwa, meskipun ada upaya untuk mempertimbangkan hukum dan konvensi internasional yang melindungi hak asasi manusia, beberapa negara secara efektif menutup program-program penerimaan pengungsi dan hak suaka selama pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan banyak migran terdampak dalam kondisi yang tidak pasti dan sulit.

Dari segi kesehatan, pandemi telah mengekspos kerentanan pengungsi dan migran di kamp-kamp yang sudah sulit dalam memenuhi standar kebersihan dasar dan ketersediaan layanan kesehatan. Meskipun beberapa panduan telah dikeluarkan oleh organisasi multilateral seperti WHO, UNHCR, dan IOM untuk melindungi hak asasi manusia pengungsi, implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Selain itu, pandemi juga memunculkan isu-isu penting terkait akses kesehatan bagi migran di luar kamp, terutama mereka yang memiliki status imigrasi yang tidak pasti. Beberapa negara merespons dengan meningkatkan akses layanan kesehatan bagi semua imigran, namun kebijakan semacam itu belum menjadi aturan umum.

Dari segi ekonomi, migran terbukti lebih rentan terhadap efek kolateral dari penutupan ekonomi global. Mereka overrepresented di sektor-sektor yang paling terpuak akibat penutupan, dan hambatan birokratis seperti proses reakreditasi yang mahal dan memakan waktu dapat menghambat pekerjaan tenaga kesehatan yang berkualifikasi tinggi. Penelitian ini memberikan pandangan global yang komprehensif terhadap dampak COVID-19 terhadap migrasi, menyajikan analisis kebijakan untuk mendetailkan penutupan perbatasan, pembatasan perjalanan, dan implikasi tanggung jawab terkait hak suaka. Meskipun pandemi telah mengungkapkan kerentanan dan ketidaksetaraan dalam sistem migrasi global, masih diperlukan langkah-langkah konkret dan koordinasi internasional untuk melindungi hak-hak migran di masa depan.

Penelitian mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap migrasi global oleh Nasar Meer dan Leslie Villegas dari University of Edinburgh (2020) memberikan pemahaman yang signifikan tentang tantangan dan perubahan dramatis yang dihadapi oleh populasi migran di tengah penutupan perbatasan dan pembatasan perjalanan yang diberlakukan oleh berbagai negara. Meskipun ada upaya beberapa negara untuk mempertimbangkan kaidah hukum internasional yang melindungi hak asasi manusia, terutama terkait pengungsi dan pencari suaka, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencegah negara-negara untuk secara efektif menutup program-program penerimaan pengungsi dan hak suaka selama pandemi. Hal ini mengakibatkan banyak migran terjebak dalam kondisi yang tidak pasti dan sulit, menyoroti ketidakpastian hak asasi manusia dalam konteks migrasi selama krisis kesehatan global.

Penelitian ini juga memberikan tinjauan yang mendalam terhadap dampak kesehatan pada populasi migran, terutama mereka yang tinggal di kamp-kamp. Meskipun beberapa panduan dari organisasi multilateral telah dikeluarkan, implementasinya masih menemui tantangan serius, mengungkapkan kerentanan kesehatan yang lebih besar bagi mereka yang sudah tinggal dalam kondisi yang

kurang memadai sebelum pandemi. Sementara itu, penelitian ini menyajikan analisis ekonomi yang mencolok, menunjukkan bahwa migran tidak hanya lebih rentan terhadap infeksi, tetapi juga lebih terpukul oleh dampak ekonomi penutupan global. Faktor-faktor birokratis seperti proses reakreditasi juga diidentifikasi sebagai hambatan utama bagi pekerjaan kesehatan yang berkualifikasi tinggi, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses pekerjaan di sektor medis.

Terkait dengan respons negara terhadap pandemi, penelitian ini memberikan sorotan pada ketidakpastian akses layanan kesehatan bagi migran yang memiliki status imigrasi yang tidak pasti. Meskipun beberapa negara menanggapi dengan meningkatkan akses layanan kesehatan bagi semua imigran, kebijakan semacam itu masih dianggap sebagai pengecualian dan belum menjadi norma umum. Selain itu, penelitian ini menyoroti hambatan hukum dan pelaksanaan kebijakan imigrasi di tengah pandemi, menciptakan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap hukum internasional. Dengan menggabungkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek ini, penelitian tersebut menciptakan pemahaman yang holistik tentang dampak pandemi Covid-19 pada migrasi global. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan beberapa celah penelitian yang dapat diisi untuk lebih memahami dinamika kompleks ini dan memberikan pandangan yang lebih luas tentang perubahan yang terjadi dalam sistem migrasi internasional selama masa krisis kesehatan ini.

Dalam penelitian ini melihat bagaimana kebijakan migrasi yang diterapkan di Indonesia, yaitu kebijakan restriktif, proaktif, dan selektif, sebagai respons terhadap pandemi Covid-19, mempengaruhi pergerakan penduduk internasional yang masuk dan keluar dari negara. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana implementasi kebijakan migrasi tersebut setelah pandemi berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dampak kebijakan migrasi pasca-pandemi Covid-19 di Indonesia dengan fokus pada restrukturisasi restriktif, proaktif, dan selektif. Analisis mendalam terhadap kebijakan tersebut akan memberikan pemahaman tentang bagaimana perubahan tersebut memengaruhi mobilitas internasional, kontribusi migran terhadap pemulihan ekonomi, serta dinamika seleksi migran dan integrasi mereka di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam beberapa aspek. Pertama, akan memberikan wawasan kritis kepada pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan migrasi yang sesuai dengan kondisi aktual dan kebutuhan masyarakat. Kedua, akan membantu dalam memahami kontribusi migran terhadap pemulihan ekonomi, memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan proaktif yang diimplementasikan. Selain itu, penelitian ini memberikan landasan untuk perlindungan hak pekerja migran dan strategi pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Terakhir, studi ini mempertimbangkan perubahan pandangan masyarakat terhadap migrasi, memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi dan meningkatkan pemahaman tentang integrasi sosial di tengah kebijakan migrasi yang baru pasca Covid-19.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk menganalisis dampak kebijakan migrasi pasca-pandemi Covid-19 di Indonesia. Metode penelitian kualitatif dengan studi kasus merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena atau permasalahan secara mendalam dalam konteks tertentu. Penelitian ini berfokus kepada kebijakan Migrasi Restriktif, Proaktif, dan Selektif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kasus kebijakan pasca pandemi covid-19 di Indonesia. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif, di mana peneliti mengidentifikasi kebijakanyang dibuat pemerintah Indonesia pasca Pandemi Covid-19 tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak kebijakan migrasi terhadap mobilitas internasional dan kontribusinya terhadap pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi.

3. RESEARCH

3.1 KEBIJAKAN MIGRASI PASCA PANDEMI COVID-19

Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia merespon dampak pandemi Covid-19 terhadap migrasi internasional dengan menerapkan kebijakan yang menggambarkan pendekatan restriktif, proaktif, dan selektif. Pertama, Kebijakan Restriktif, Sebagai respons terhadap risiko penyebaran virus, pemerintah Indonesia mengenalkan kebijakan restriktif terkait masuknya warga negara asing ke wilayahnya. Semua perjalanan internasional harus melibatkan pemeriksaan kesehatan ketat, termasuk persyaratan tes Covid-19 negatif sebelum keberangkatan dan karantina setibanya di Indonesia. Selain itu, visa on arrival untuk beberapa negara dihentikan untuk sementara waktu. Kedua, Kebijakan Proaktif, untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-Covid-19, pemerintah Indonesia meluncurkan program proaktif yang memberikan insentif kepada para pekerja migran yang kembali ke tanah air. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, bantuan keuangan, dan fasilitasi reintegrasi ke dalam pasar kerja lokal. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasta dan organisasi internasional untuk memastikan bahwa para pekerja migran mendapatkan dukungan yang cukup. Ketiga, Kebijakan Selektif, Pemerintah Indonesia juga mengadopsi pendekatan selektif dalam menerima pekerja migran baru. Pemeriksaan lebih ketat terhadap kualifikasi, pengalaman kerja, dan tujuan migrasi diterapkan untuk memastikan bahwa pekerja migran yang datang ke Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan dan dapat mengisi kekurangan tenaga kerja tertentu. Kriteria ini diterapkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor tertentu yang menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional (Witono, 2021).

A. Kebijakan Restriktif

Kebijakan migrasi pasca pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya kebijakan restriktif, mencerminkan upaya pemerintah untuk mengelola pergerakan manusia demi menjaga keamanan nasional dan melindungi masyarakat dari risiko kesehatan. Kebijakan ini memiliki dampak signifikan terhadap dinamika migrasi internasional dan menjadi respons atas kondisi darurat kesehatan global yang tidak terduga. Dalam konteks restriktif, pemerintah Indonesia

mengimplementasikan serangkaian langkah pembatasan perjalanan, pengawasan ketat di pintu masuk, dan aturan keimigrasian yang ketat. Pertama, pembatasan perjalanan internasional menjadi salah satu poin sentral dalam kebijakan restriktif. Pemerintah Indonesia membatasi masuknya warga negara asing dengan memberlakukan aturan ketat terkait visa dan persyaratan perjalanan. Pembatasan ini melibatkan penangguhan sementara pemberian visa kunjungan dan pengurangan frekuensi penerbangan internasional. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko penyebaran virus Covid-19 melalui mobilitas lintas batas. Kedua, pengawasan ketat di pintu masuk menjadi elemen penting dalam kebijakan restriktif. Pemeriksaan suhu tubuh, tes Covid-19, dan karantina wajib menjadi bagian dari prosedur ketat di bandara dan pelabuhan. Langkah ini tidak hanya berfungsi untuk mendeteksi kemungkinan kasus infeksi, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi penularan di dalam negeri (Witono, 2021).

Aturan keimigrasian yang ketat diterapkan untuk memastikan bahwa setiap individu yang memasuki wilayah Indonesia mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Hal ini melibatkan peninjauan kembali prosedur visa, pengaturan ulang izin tinggal, dan peningkatan pengawasan terhadap status keimigrasian individu. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka yang memasuki Indonesia adalah orang yang benar-benar membutuhkan dan mematuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan. Kebijakan restriktif ini juga menimbulkan sejumlah dampak, terutama dalam konteks ekonomi dan sosial. Industri pariwisata dan sektor lain yang terkait dengan mobilitas internasional dapat mengalami penurunan signifikan, sementara para pekerja migran dan pelaku usaha mikro kecil menengah yang tergantung pada hubungan lintas batas dapat mengalami kesulitan. Kebijakan migrasi restriktif pasca pandemi Covid-19 di Indonesia mencerminkan upaya serius untuk menanggapi kondisi darurat kesehatan global, tetapi juga memerlukan keseimbangan yang hati-hati untuk meminimalkan dampak negatif pada berbagai sektor. Selain itu, evaluasi dan penyesuaian terus-menerus atas kebijakan ini menjadi penting seiring dengan perkembangan situasi pandemi dan dinamika migrasi internasional (Gostin & Katz, 2016).

Pembatasan perjalanan dan pengawasan ketat di pintu masuk menjadi dua pilar kunci dalam kebijakan migrasi restriktif Indonesia pasca pandemi Covid-19. Pertama, pembatasan perjalanan internasional menunjukkan upaya pemerintah untuk mengontrol dan mengurangi mobilitas lintas batas sebagai respons terhadap risiko penyebaran virus. Langkah ini melibatkan pengetatan persyaratan visa, pembatasan jumlah penerbangan, dan pengurangan frekuensi layanan transportasi internasional. Pembatasan perjalanan menjadi strategi utama untuk meminimalkan risiko impor kasus Covid-19 dan memastikan bahwa mereka yang memasuki wilayah Indonesia telah memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan (ILO, 2020).

Pengawasan ketat di pintu masuk mencakup serangkaian tindakan pengamanan dan pemeriksaan yang diterapkan di bandara, pelabuhan, dan jalur masuk lainnya. Prosedur pengawasan melibatkan pemeriksaan suhu tubuh, tes Covid-19, dan langkah-langkah keamanan yang ketat. Pemerintah Indonesia mengimplementasikan sistem pelacakan dan pemantauan yang lebih canggih untuk mengidentifikasi, melacak, dan mengisolasi potensi kasus Covid-19. Langkah ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini dan

mengendalikan penyebaran virus di tingkat pintu masuk, mengurangi risiko penularan di dalam negeri, dan melindungi kesehatan masyarakat.

B. Kebijakan Proaktif

Kebijakan proaktif di Indonesia pasca pandemi Covid-19 mencerminkan respons pemerintah terhadap perubahan dinamika migrasi internasional dengan meningkatkan sistem keamanan dan pencegahan. Fokus utama dari kebijakan proaktif ini adalah untuk mengatasi berbagai tantangan baru yang muncul, seperti meningkatnya ancaman keamanan dan risiko kesehatan global. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mengimplementasikan serangkaian langkah proaktif yang mencakup peningkatan teknologi keamanan, kerja sama internasional dalam pemberantasan perdagangan manusia, dan peningkatan kapasitas penegakan hukum keimigrasian. Peningkatan teknologi keamanan menjadi elemen kunci dari kebijakan proaktif. Pemerintah Indonesia meningkatkan infrastruktur keamanan di pintu masuk dan jalur perbatasan menggunakan teknologi canggih seperti pemindaian biometrik dan sistem pengenalan wajah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas identifikasi dan pelacakan individu, serta untuk mencegah pergerakan mereka yang berpotensi membahayakan keamanan nasional (Prabowo, 2020).

Selanjutnya, kerja sama internasional dalam pemberantasan perdagangan manusia menjadi fokus penting dalam kebijakan proaktif. Pemerintah Indonesia terlibat dalam berbagai forum internasional dan regional untuk berkolaborasi dengan negara-negara mitra dalam upaya memerangi perdagangan manusia dan kejahatan lintas batas terkait migrasi. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, pembentukan tim kerja bersama, dan pengembangan strategi bersama untuk menghadapi tantangan migrasi transnasional. Selain itu, peningkatan kapasitas penegakan hukum keimigrasian merupakan langkah proaktif lainnya. Pemerintah Indonesia memperkuat pelatihan dan peralatan untuk petugas keimigrasian, termasuk peningkatan keterampilan dalam identifikasi dokumen palsu, pelacakan jejak keimigrasian, dan penanggulangan kasus perdagangan manusia. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pemeriksaan keimigrasian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, sambil memastikan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia.

C. Kebijakan Selektif

Kebijakan selektif di Indonesia pasca pandemi Covid-19 mencerminkan pendekatan yang berfokus pada penilaian risiko dan kualifikasi individu dalam mengatur pergerakan manusia melintasi perbatasan. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu yang memasuki wilayah Indonesia memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada intinya, kebijakan selektif menuntut adanya proses seleksi yang lebih cermat dalam menerima atau menolak migran berdasarkan kriteria tertentu, termasuk aspek kesehatan, keterampilan, atau alasan khusus lainnya. Pertama, dalam konteks kesehatan, kebijakan selektif mencakup pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat untuk meminimalkan risiko penyebaran penyakit, termasuk Covid-19. Pemerintah dapat menerapkan persyaratan tes kesehatan, karantina, atau vaksinasi sebagai bagian dari proses seleksi untuk memastikan bahwa individu

yang memasuki wilayah Indonesia tidak membawa ancaman kesehatan masyarakat. Kedua, dalam aspek keterampilan, kebijakan selektif dapat mencakup penilaian terhadap kualifikasi dan keahlian individu. Pemerintah dapat memprioritaskan migran dengan keterampilan atau latar belakang pendidikan tertentu yang dianggap dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mengarahkan arus migrasi menuju sektor-sektor tertentu yang diinginkan oleh pemerintah (Prasetya, 2020).

3.2 PELAKSANAAN KEBIJAKAN MIGRASI PASCA PANDEMI COVID-19

Dalam kebijakan ini, pemerintah Indonesia meluncurkan program yang mendukung pemulihan ekonomi pasca-Covid-19, khususnya untuk para pekerja migran yang kembali ke tanah air. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, bantuan keuangan, dan fasilitasi reintegrasi ke dalam pasar kerja lokal (Wijaya et al). Pemerintah bekerja sama dengan lembaga swasta dan organisasi internasional untuk memastikan para pekerja migran mendapat dukungan yang cukup, yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional. Evaluasi terhadap dampak kebijakan ini mencakup analisis kontribusi pekerja migran dalam sektor-sektor terkait ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

A. Pelaksanaan Kebijakan Migrasi Restriktif

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengelola pergerakan penduduk dan menjaga kesehatan nasional, dampaknya terhadap industri pariwisata dan sektor terkait mobilitas internasional dapat menghambat pemulihan ekonomi. Pembatasan perjalanan dan pengawasan ketat memang mengurangi risiko penyebaran Covid-19, namun langkah tersebut juga mempengaruhi sektor-sektor yang bergantung pada wisatawan asing dan pekerja migran, sehingga memerlukan penyesuaian kebijakan agar dapat mendukung pemulihan ekonomi secara lebih optimal. Penyesuaian kebijakan yang hati-hati menjadi penting untuk mengurangi dampak negatif pada sektor-sektor vital yang berperan dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi (Witono, 2021).

B. Pelaksanaan Kebijakan Migrasi Proaktif

Pelaksanaan Kebijakan Migrasi Proaktif di Indonesia pasca-pandemi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional, meskipun kebijakan ini pada dasarnya lebih menekankan pada aspek keamanan dan mitigasi risiko. Salah satu langkah utama dalam kebijakan proaktif adalah peningkatan sistem keamanan di pintu masuk negara, yang mencakup penggunaan teknologi canggih seperti pemindaian biometrik dan sistem pengenalan wajah. Langkah ini bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap migrasi internasional, mengidentifikasi potensi ancaman kesehatan atau keamanan, serta memastikan bahwa pergerakan manusia yang masuk ke Indonesia aman dan tidak membahayakan.

Keamanan yang lebih baik ini memiliki dampak langsung pada pemulihan ekonomi. Ketika negara merasa aman dan stabil, baik dari segi kesehatan maupun ancaman lainnya, hal ini menciptakan suasana yang kondusif untuk investasi asing. Investor cenderung lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di negara yang memiliki sistem keamanan yang baik, karena hal ini mengurangi risiko dan meningkatkan kepastian bisnis. Selain itu, stabilitas

keamanan juga penting untuk memulihkan sektor-sektor lain seperti pariwisata, yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat internasional.

C. Pelaksanaan Kebijakan Migrasi Selektif

Pelaksanaan Kebijakan Migrasi Selektif di Indonesia pasca-pandemi memberikan kontribusi penting terhadap pemulihan ekonomi nasional, terutama melalui penyesuaian kriteria migrasi dan penilaian terhadap keterampilan individu. Pemerintah Indonesia, dalam kebijakan ini, memfokuskan pada seleksi migran yang memiliki keterampilan atau latar belakang pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa migran yang masuk ke Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, tetapi juga dapat berkontribusi secara langsung pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk mendukung pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi.

Salah satu aspek utama dari kebijakan selektif ini adalah memprioritaskan migran dengan keterampilan yang sesuai dengan sektor-sektor strategis, seperti teknologi informasi, kesehatan, dan industri manufaktur. Dengan mengarahkan migrasi ke sektor-sektor ini, Indonesia dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi yang sebelumnya terdampak pandemi. Misalnya, tenaga kerja terampil di sektor teknologi atau kesehatan dapat membantu memperkuat infrastruktur digital dan sistem kesehatan nasional, dua hal yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pasca-pandemi. Selain itu, tenaga kerja yang berkompeten dalam bidang-bidang ini dapat membantu mempercepat inovasi dan meningkatkan daya saing industri dalam menghadapi tantangan global.

4. CONCLUSION

Kebijakan migrasi Indonesia pasca pandemi Covid-19 mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menanggapi tantangan baru yang muncul seiring dengan perubahan dinamika global. Kebijakan restriktif, proaktif, dan selektif membentuk kerangka kerja yang kompleks, di mana pembatasan perjalanan, pengawasan ketat di pintu masuk, peningkatan sistem keamanan, kolaborasi internasional, penilaian risiko individu, dan penyesuaian kriteria migrasi menjadi elemen-elemen kunci. Penerapan kebijakan restriktif menunjukkan komitmen untuk menjaga keamanan nasional dan kesehatan masyarakat, meskipun memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi yang bergantung pada mobilitas internasional. Kebijakan proaktif mencerminkan respons terhadap perubahan dinamika migrasi dengan meningkatkan sistem keamanan dan upaya pencegahan, sementara kebijakan selektif menunjukkan usaha untuk mengelola pergerakan manusia dengan lebih cermat dan berbasis risiko.

Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia merespon dampak pandemi Covid-19 terhadap migrasi internasional dengan menerapkan kebijakan yang mencerminkan pendekatan restriktif, proaktif, dan selektif. Kebijakan restriktif bertujuan untuk mengendalikan penyebaran virus dengan pembatasan perjalanan dan pengawasan ketat di pintu masuk. Kebijakan proaktif diluncurkan

untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif kepada pekerja migran yang kembali. Sementara kebijakan selektif difokuskan pada penilaian risiko dan kualifikasi individu untuk mengatur pergerakan manusia. Evaluasi terus-menerus dilakukan untuk mengukur dampak kebijakan migrasi ini terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, dan integrasi pekerja migran. Data statistik melibatkan tingkat keberhasilan dalam menekan penyebaran Covid-19, kontribusi ekonomi pekerja migran, dan efektivitas program reintegrasi. Analisis epidemiologi, ekonomi, dan integrasi menjadi bagian integral dari evaluasi ini.

REFERENCES

- Anjani, K. S., Pradana, H. R., & Hartanto, Y. T. (2021). Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Tata Kelola Keimigrasian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 1188-1196.
- Borjas. (2014). *Immigration Economics*. Harvard University Press.
- Brigham, & Houston. (2019). *Fundamental of Financial Management: Dasar-Dasar Manajemen Keuangan: Edisi 14*. Jakarta: Salemba Empat.
- Briguglio, L. (2009). *Economic Vulnerability and Resilience Concepts and Measurements*. Oxford Development Studies.
- Castles, S. (2014). *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. Palgrave Macmillan.
- Cresswell, & Clark, P. (2017). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Sage Publications.
- Darmadji, & Fakhrudin. (2011). *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Easson, A. (2004). *Tax Incentives for Foreign Direct Investment*. Kluwer Law International.
- Gostin, & Katz. (2016). *The International Health Regulations: The Governing Framework for Global Health Security*. *The Milbank Quarterly* Vol. 94 No. 2.
- Hamzah, A., & Nurdin, S. (2021). Analisis Tindakan dan Motif Ekonomi Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Jenjang Pendidikan Anak di Desa Tebas Sungai. *Jurnal Akuatika Indonesia*, 1-10.
- Hasan, e. a. (2021). Pengembangan Ekonomi Kreatif Sektor UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 125-138.
- Hatton, & Williamson. (2005). *Global Migration and the World Economy: Two Centuries of Policy and Performance*. MIT Press.
- Hery. (2016). *Mengenal dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan*. PT. Grasindo.
- Hery. (2018). *Analisa Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive Edition*. PT. Gramedia.
- Hery. (2018). *Analisa Laporan Keuangan: Integrated and Comprehensive Edition*. PT. Gramedia.
- ILO. (2020). *Risalah Kebijakan ILO: Pelindungan pekerja migran selama pandemi COVID-19, Rekomendasi bagi Pembuat Kebijakan dan Konstituen*.
- Kamar, B., & Soto, R. (2015). *Monetary Policy and Economic Performance in Resource Dependent Economies*.

- Kasmir. (2018). Analisis Laporan Keuangan. Depok: Rajawali Pers.
- Margaretha, F. (2005). Manajemen Keuangan Investasi dan Sumber Dana Jangka Pendek. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Martin, & Widgren. (2019). International Migration: Evolving Trends from the Early Twentieth Century to the Present. Edward Elgar Publishing.
- Meer, N., & Villegas, L. (2020). The Impact of COVID-19 on Global Migration. Governance of the Local Integration of Migrants and Europe's Refugees (GLIMER).
- Prabowo. (2020, April 8). Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/11471681/7-jurussaktipemerintah-untuk-jaring-pengaman-sosial-atasi-dampak-COVID-19>
- Prasetya. (2020, Maret 19). Retrieved from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2020/03/19/191131026/imbis-virus-coronapenempatan-pekerja-migran-indonesia-ke-luar-negeri>
- Sukirno, S. (2008). Makro Ekonomi: Teori Pengantar (Edisi Ketiga).
- Viard, A. D. (2009). Tax Policy During the Recession: The Role of Fiskal Stimulus. American Enterprises Institute.
- Wijaya, Almarorojati, & Laoli. (2023). Upaya Imigrasi dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 137-144.
- Witono. (2021). Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pandemi COVID-19. Indonesian Journal of Peace and Security Studies.